

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN DINAS SOSIAL
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERLINDUNGAN ANAK
JALANAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**ANGGRAINI DWI PUSPA
NPM: 1521020258**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN DINAS SOSIAL
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERLINDUNGAN ANAK
JALANAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
ANGGRAINI DWI PUSPA
NPM : 1521020258**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. A. Khumeidi Jafar, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Fenomena anak jalanan di Kota Bandar Lampung merupakan fenomena yang tidak bisa dianggap sebelah mata terlebih dengan adanya berbagai kasus eksploitasi yang dekat dengan kehidupan anak jalanan, selain itu jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung masih banyak terlihat anak-anak dibawah umur yang berkerja dilampu merah dijalan raya Kota Bandar Lampung dan mengalami peningkatan aetiap tahunnya . Sebagai wujud dalam penanganan perhatian terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimana undang-undang tersebut berisikan tentang hak-hak kesejahteraan anak yang dalam tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam upaya perlindungan anak jalanan. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam perlindungan anak jalanan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimanakah Peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam upaya perlindungan anak jalanan dan Untuk Mengetahui Bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam perlindungan anak jalanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelilian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian deskriptif analitis dan analisis kualitatif yaitu terjun langsung kelapangan, mencatat, menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa . Pada tahun 2013- 2015 Dinas Sosial memiliki program berupa pembinaan terhadap anak jalanan dengan menyalurkan anak-anak jalanan ke Yayasan Sinar Jati. Di Panti Asuhan tersebut, anak-anak jalanan di bimbing serta di bina. Akan tetapi program untuk menanggulangi anak jalanaan tersebut sudah tidak lagi terealisasikan mulai dari tahun 2016 hingga sekarang. Dalam pandangan Hukum Islam yang mengatur tentang anak telah dijelaskan dalam Al-quran bahwasanya anak sebagai amanah dari Allah swt, demikian pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 233.

Direkomendasikan kepada Dinas Sosial yang seharusnya program untuk mensejahterakan anak jalanan tersebut seharusnya dilanjutkan kembali supaya mengurangi tingkat anak jalanan di Kota Bandar Lampung, kepada orang tua seharusnya lebih memberikan perhatian terhadap anak dan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Peran Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan
Anak Jalanan**

Nama : Anggraini Dwi Puspa

NPM : 1521020258

Jurusan : Siyasaah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosayah dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
NIP. 195707051989031001

Pembimbing II

Dr. H. A. Khumeldi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasaah

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul) **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERLINDUNGAN ANAK JALANAN** disusun oleh: **Anggraini Dwi Puspa**, NPM: 1521020258, program studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **2019.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Zuhraini ., S.H.,M.H** (.....)

Sekretaris : **Syeh Sarif Hidayatullah ., M.H.I** (.....)

Penguji Utama : **Dr. H. Jayusman ., M.Ag** (.....)

Penguji Pendamping I : **Dr. H. Bunyana Sholihin ., M.Ag** (.....)

Penguji Pendamping II : **Dr.H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-nisa (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu ku tersayang, Yuniar Budiarmo dan Ibu Desi Asiana, berkat doa restu darinya lah penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih ayahku yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan putrimu yang kamu sayangi dan terimakasih atas nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosan ibu berikan kepada penulis untuk mencapai kesuksesan. Terimakasih telah mengandung, melahirkan, dan merawatku hingga menjadi seperti ini. Karya sederhana ini yang penulis persembahkan tidak sejujung kuku pun dapat membalas perjuangan kalian tetapi penulis berharap karya ini akan sedikit memberikan rasa bangga dan senyum kebahagiaan di wajah yang sudah mulai menua dan sedikit membayar lelah dan letih atas perjuangan kalian.
2. Kakak dan Adikku tercinta, Ayu Eka Puspita, Ari Rizki Saputra, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepadamu.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilan.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Anggraini Dwi Puspa, lahir pada tanggal 03 Maret 1997 di Bandar Lampung. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yuniar Budiarjo dan Ibu Desi Asiana Azis Beralamat Jl Karimun Jawa Gg sulaiman (Perumdam 3) Sukarame Bandar Lampung

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2002 di Taman Kanak-kanak (TK) Permata Biru Bandar Lampung.
2. Penulis mulai melanjutkan pendidikan dasar di SDN 2 Sukarame pada tahun 2003.
3. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 24 Bandar Lampung pada tahun 2009. Selama duduk dibangku SMP penulis menjadi anggota pramuka.
4. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMA PERINTIS 1 Bandar Lampung pada tahun 2012.
5. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyasah melalui jalur PMA

Bandar Lampung, 01 November 2019
Yang Membuat,

Aanggraini Dwi Puspa

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERLINDUNGAN ANAK JALANAN”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

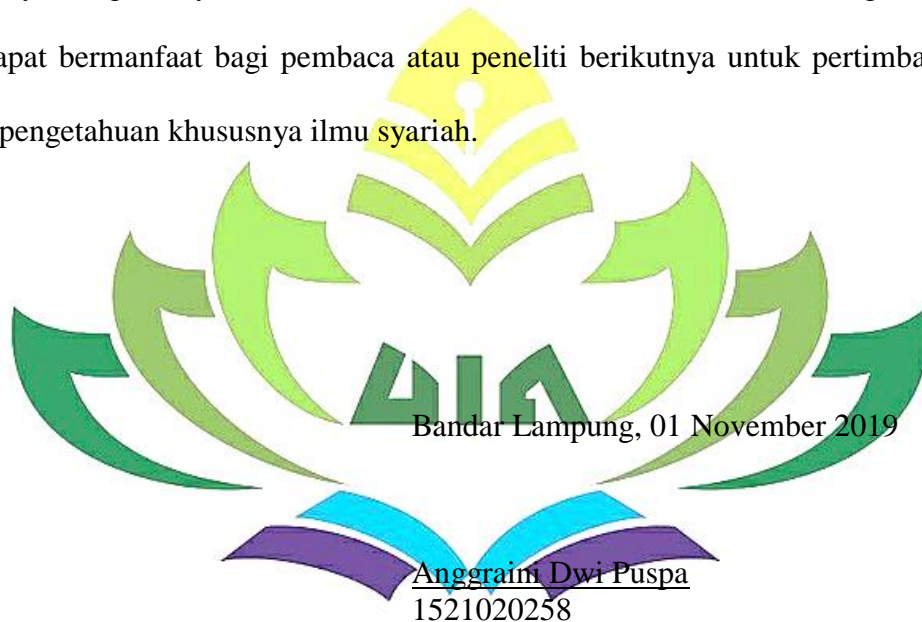
1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Dr. H. A. Khumeidi Jafar, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga Civitas Akademika, Dosen, dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Siyasa Angkatan 2015, khusus Siyasa E: Tiara Virginia, Rizki Amelia, S.H, Fitriani, S.H, Rima Sinfalina, Yunnita, S.H, Repi Susanti, S.H, Elisa Septiona, S.H, Nadiyah Sudirman, Ice Sintia Dewi, Putri Mayang Lorenza, Habibullah Al ansyor, Ovi Adiansyah, Jodi Hendro Priono, Andrian Firdaus, S.H, Billi Firmansyah, Yedi Irawan, Khomsi Juniardi, S.H, Ahmad Zaenuri, Khoirul Adha, A. Windo Adenensi, S.H, Samsuddin Bukhori, Ridho Qodar, Bambang Supriadi, Ari Fitrandi, Fauzi Fadhilla yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi..
9. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang Enjiw, Tiwi, Mayang, Matang, Ipeh, Fajar, Gilang, Satria, Iduy, Wahyu dan Nopee yang sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi
10. Teruntuk teman seperjuangan skripsi ku Ria Dwi Afrida, Rizki Amelia, Ice Sintia Dewi, Rima Sinfalina Gosa, Fitriani, Aldi Aprilianto dan Tri Bagus

Saputra terimakasih kalian sudah selalu mendengarkan keluh kesah ku tentang skripsi, yang selalu mau direpotkan dari awal penelitian hingga mengerjakan skripsi dan sangat banyak membantu dalam mengerjakan skripsi ku hingga pada akhirnya terselesaikannya skripsi..

11. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iy
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. KajianTeori	17
1. Pengertian Anak Jalanan.....	17
2. Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan	24
3. Pengertian HAM	26
4. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Hak-Hak Kesejahteraan Anak Dalam Islam	29
B. TinjaunPustaka.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	49
B. Lokasi Penelitian Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung	50
C. Gambaran Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.....	52
D. Program Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap Anak Jalanan.....	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Kesejahteraan Anak Jalanan	63
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Hukum dan Hak Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1	PedomanObservasi
Lampiran 2	BlangkoKonsultasi
Lampiran 3	PedomanWawancara
Lampiran 4	SuratKeteranganWawancara
Lampiran 5	DokumenPendukung (foto)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah “**Analisis Hukum Islam Tentang Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak Jalanan**” judul tersebut terdiri dari istilah pokok yaitu sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan lain-lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Untuk memperoleh pengertian yang tepat serta pemahaman yang relevan.¹

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman waktu dan ruang manusia.²

Peran Dinas Sosial adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan posisi tertentu yaitu dalam dinas sosial. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda juga. Tetapi apa yang

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Edisi Keempat, h. 58.

² Said Agil Hasin, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6.

membuat tingkah laku itu sesuai dalam situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut, dalam hal ini kaitannya dengan dinas sosial.³

Kota Bandar Lampung adalah Ibu Kota Provinsi Lampung yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan, dan pusat kegiatan perekonomian Provinsi Lampung.⁴

Perlindungan adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, terhadap sikap tindakan atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan sesekali dikemukakan pula aspek-aspek teoritiknya.⁵

Anak Jalanan adalah anak gelandangan atau disebut juga sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial untuk kelangsungan kehidupan mereka.⁶

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), h. 221.

⁴ Balai Pusat Statistik, 2010

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 267

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: PenaMedia Group, 2016), h. 199

Berdasarkan penjelasan istilah diatas dapat disimpulkan bahawa yang dimaksud dengan pengertian judul “*Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum dan Hak Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*” yaitu suatu penelitian secara ilmiah terhadap perlindungan hukum dimana anak jalanan harus dilindungi oleh hukum dan wajib diberikan hak-hak untuk kesejahteraan mereka mengingat anak adalah amanah dan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum dan Hak Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut :

1. Alasan Obyektif

Karena masih banyaknya anak jalanan yang masih belum mendapatkan hak kesejahteraan dan perlindungan hukum dimana anak yang seharusnya sekolah , bermain dengan anak seusianya Sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal (1) Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dan pada umumnya anak jalanan yang terlantar merupakan bentuk realisasi yang belum maksimal dari pemenuhan hak dan pemberian kebutuhan yang terabaikan bagi anak-anak jalanan baik dari segi perlindungan hukum maupun hak kesejahteraannya, terutama kebutuhan pokok sebagai seseorang anak yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan dan pendidikan seperti anak pada umumnya

2. Alasan Subyektif

- a) Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari di jurusan Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah.
- b) Karena permasalahan ini sangat aktual sehingga peneliti sangat tertarik untuk membahas permasalahan tentang perlindungan hukum dan hak kesejahteraan anak jalan (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

C. Latar Belakang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.⁷ Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

⁷ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (<http://kbbi.web.id>, 2016)

seutuhnya.⁸ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa deskriminasi.⁹

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”. Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.¹⁰

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, Bahwa anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) katagori hak-hak anak, anantara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8-9.

¹⁰ *Ibid.*, h. 12.

2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak-hak anak meliputi hak perlindungan dari deskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak.
4. Hak anak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.¹¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat mendasar. Keberadaannya tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia”.¹²

¹¹*Ibid.*, 14.

¹²Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Menurut Pasal 1 Angka 6 Nomor. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹³

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal, selain itu juga ajaran islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ajaran islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW *"pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan"*. Islam juga memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian¹⁴

¹³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹⁴*Ibid.*, h. 18-21.

Ayat Allah SWT yang berbicara tentang bagaimana sang anak berhak mendapatkan pendidikan baik agama maupun ilmu pengetahuan sosial. Hal ini tertulis jelas di Al-Qur'an surah Luqman ayat 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya : "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman :13)¹⁵

Maksud dari ayat al-qur'an diatas ini adalah bahwa seseorang anak wajib dan berhak mendapatkan pendidikan yang harus dilakukan anak-anak pada umunya sehingga anak mendapatkan pengetahuan yang luas dan pembinaan yang baik serta hak-hak kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan.

Hubungan Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit.¹⁶

Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukan bahwa islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung : CV Penerbit di Ponegoro, 2010),h. 412

¹⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Mnesia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 51.

merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya mengkaji tentang perlindungan hukum dan hak kesejahteraan anak. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut karena merupakan langkah awal untuk melindungi hak-hak mereka terutama kesejahteraan anak dan perlindungan hukum.

Mengingat ajaran islam tidak memperbolehkan umatnya atau umat islam untuk tidak berlaku adil dan mengharamkan melantarkan anak-anak sehingga kehidupan umat islam dapat sejahtera. Dengan mengetahui perlindungan hukum dan kesejahteraan anak jalanan.

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti agar lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada perlindungan hukum dan kesejahteraan anak jalanan di Kota Bandar Lampung serta bagaimana program Dinas Sosial dalam upaya mensejahterakan anak jalanan dilihat dari perspektif hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam upaya perlindungan anak jalanan?

2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam perlindungan anak jalanan?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam Perlindungan anak Jalanan.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam perlindungan anak jalanan.
- c. Untuk menambah pengetahuan tentang Analisis Hukum Islam Tentang peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam perlindungan anak jalanan.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka signifikansi atau manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Signifikansi secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan di atas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat:
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang ilmu Hukum Tata Negara penelitian skripsi ini.
 - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahanya maupun dalam upaya kesejahteraan dan perlindungan hukum aterhadap anak jalanan di Kota Bandar Lampung

2. Signifikansi secara praktis yaitu:

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis.
- b. Sebagai masukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam membuat program untuk kesejahteraan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan untuk mengurangi tingkat besar nya anak jalanan.
- c. Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa/i sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penulis melakukan penelitian langsung dengan mewawancari anak-anak jalanan yang berada di lampu merah di Jl. Sultan Agung Way Halim, lampu merah di Jl. Soekarno Hatta dan lampu merah Pahoman, serta mewawancari pihak dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis* yaitu yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Metode ini hakikatnya mencari teori bukan menguji teori¹⁷.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian, sumber data terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.
- b. Data Skunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.¹⁸

¹⁷ Susiadi AS., M.Kom.I, *Metidologi Penilitin*, (Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas Syarian IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.19

¹⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁰ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²¹ *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini yaitu:

33 ¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: BumiAksara, 2006), h.

²⁰ Susiadi, *Metodologi.*, h. 81.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 191), h. 102.

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan proses yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan penelitian ini harus memikirkan tentang pelaksanaannya, memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis.

b. Observasi

Observasi merupakan cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamat sebagai instrument. Format yang berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²²

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang didapat sudah cukup dalam penelitian skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah sebagai berikut:

²²Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 274

a. Pemeriksa data (*Editing*)

Editing yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

b. Sistematis Data (*constructing dan systematizing*)

Penyusunan atau Sistematis Data adalah pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah²³.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara *Deskriptif* yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dalam arti (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Keduanya dalam laporan penelitian dapat digunakan agar saling melengkapi. Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks (lingkungan) tempat penelitian dilakukan dilaporkan dengan cara deskriptif sehingga pembaca memahami dengan baik laporan hasil penelitiannya²⁴

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Cet ke-1, h. 9.

²⁴ Husaini Usman, *Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial edisi kedua*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) h. 129

Analisis kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, diredksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat).²⁵

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data yaitu kerangka berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.



²⁵*Ibid.*, 130.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Anak Jalanan

Istilah anak jalanan pertama kali dikenalkan di Amerika Selatan, tepatnya di Brazilia, dengan nama *Mininos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup dijalanan dan tidak memiliki ikatan dalam keluarga.²⁶ Istilah anak jalanan berbeda-beda untuk setiap tempat, misalnya di Columbia mereka disebut *gamin* (*urchin* atau *melarat*), *marginais* (*criminal* atau *marjinal*) di Rio, *pa'jaros fruteno* (*perampok kecil*) di peru, *polillas* (*ngengat*) di Bolivia, *Bui Doi* (*anak kecil*) di Vietnam. Istilah-istilah itu sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanan di dalam masyarakat.²⁷

Secara umum anak jalanan adalah perempuan dan laki-laki yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup di jalan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, terminal bis, dan stasiun kereta api.²⁸

Definisi yang dirumuskan dalam penyuluhan kemiskinan dan anak jalanan, yang diselenggarakan Departemen Sosial pada tanggal 25 dan 26 oktober 1995 anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian

²⁶Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabet, 2008), h. 231.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.²⁹

Dalam meninjau pelayanan sosial bagi anak jalanan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai definisi anak jalanan menurut para ahli. Anak jalanan dapat dideskripsikan sebagai anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalan baik untuk bekerja atau tidak bekerja yang mana keberadaan mereka di jalanan dapat mengganggu ketentraman orang lain serta membahayakan diri mereka.³⁰

Pengertian ini merupakan kesimpulan dari definisi anak jalanan menurut para ahli. Lusk menjelaskan yang dimaksud dengan anak jalanan adalah “Setiap anak perempuan atau laki-laki yang memanfaatkan jalanan menjadi tempat tinggal sementara atau sumber kehidupan dan tidak dilindungi, diawasi atau diatur oleh orang dewasa yang bertanggung jawab.”³¹

Sedangkan menurut A Soedijar Z.A mengemukakan definisi anak jalanan sebagai berikut “Anak jalanan adalah anak yang berusia 7-15 tahun yang bekerja di jalan raya dan ditempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya sendiri.”³²

²⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Pada Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), h. 80.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* h. 82.

³² *Ibid.* h. 83.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits atau pendapat para fuqoha tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan namun Hukum Islam menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu dengan fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolak ukur kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kemiskinan. Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (dalam bentuk uang) berdasarkan hanya pada tahun tertentu. Sehubungan dengan hal di atas perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam pandangan atau perspektif islam adalah orang-orang yang harus mendapatkan hak-haknya.

Dengan alasan bahwa islam sendiri juga memberi perlindungan terhadap mereka melalui ayat-ayat al-qur'an dan hadits serta pendapat para Imam madzhab. Hakikatnya, dalam Islam, harta adalah hak mutlak Allah SWT, karena Dialah yang menjadikan dan menganugerahkannya, manakala manusia hanyalah wakil (khalifah) yang ditugaskan untuk menjaga, membangunkan dan membelanjakan harta mengikut suruhan dan keredhaan-Nya. Allah SWT menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

*Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*³³

Pada hakikatnya harta yang mereka miliki adalah hanya milik Allah SWT, didalamnya terdapat bagain-bagaian dari para gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar. Islam memandang Tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia, tiga perkara tersebutlah yang harus dapat dipenuhi oleh seseorang yang dianggap mampu dan tidak terjat dalam kemiskinan.

Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai sebuah problem kehidupan yang semuanya ada solusi dan jalan keluar. Dan islam menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan dan direalisasikan atau paling tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka sehingga dapat hidup layak seperti halnya orang-orang

yang ada disekelilingnya yang mempunyai kehidupan yang berkecukupan. Tapi bukan berarti, dengan berusaha mengatasi kemiskinan tersebut. Memang, menyelesaikan masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Khususnya anak-anak adalah potret masa depan Indonesia, maka tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan yang sekarang ini dirasakan anak-anak terlantar yang ada di negara ini.

Penanganan masalah sosial yang sekarang ada masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat jalan ditempat, serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan PMKS masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Walaupun di bantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas.³⁴

Dari sejumlah uraian diatas memperlihatkan bahwa gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar tetap sebagai kelompok yang paling beresiko mengalami ancaman berbagai tindak kekerasan fisik,

³⁴ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, [www. Policy.hu/suharto/modul a/makindo 40.htm/](http://www.Policy.hu/suharto/modul%20a/makindo40.htm/) (Online), diakses pada tanggal, 20 Februari 2015.

phisikis, seksual dan pembunuhan. Semakin mereka berada di jalan, semakin berpotensi timbulnya tindak kekerasan terhadap mereka. Minimnya perlindungan yang mereka miliki, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, pada akhirnya membuat mereka tetap harus menghadapi situasi dan ancaman yang dihadapi mereka setiap waktu. Karena mereka semua bukanlah individu-individu yang seharusnya berada di jalan, mereka semua memerlukan perlindungan dan perlakuan yang sama seperti masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan perlindungan fisik, phisikis, sosial dan spiritual. Sehingga mereka dapat hidup nyaman dan terbebaskan dari jerat kemiskinan.

Dari dua definisi anak jalanan diatas, diketahui bahwa anak jalanan merupakan anak dengan rentang usia 7-15 tahun yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalan baik untuk bekerja maupun tidak, dimana keberadaan mereka dapat membahayakan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri. Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama menurut Depdiknas yaitu :

a. *Children of the street*

Anak yang hidup dan tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

b. *Children on the street*

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik

c. *Vulnerable children to be street children*

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Anak turun ke jalanan disebabkan oleh berbagai sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan, faktor tersebut menurut Huraerah adalah:

1) Kemiskinan

Kemiskinan selalu diasosiasikan dengan munculnya berbagai gejala sosial. Keluarga yang miskin akan mengerahkan semua sumber daya manusianya untuk menambah penghasilan keluarga. Oleh karena itu, selain orang tua yang bekerja, anakanak sudah dituntut bekerja.

2) Partisipasi Sekolah

Faktor makro lainnya yang sering dihubungkan dengan anak-anak yang menghabiskan waktu luangnya di jalanan adalah partisipasi sekolah. Kita dapat berasumsi bahwa jika anakanak itu bersekolah, maka sebagian waktunya tidak akan berada di jalanan.

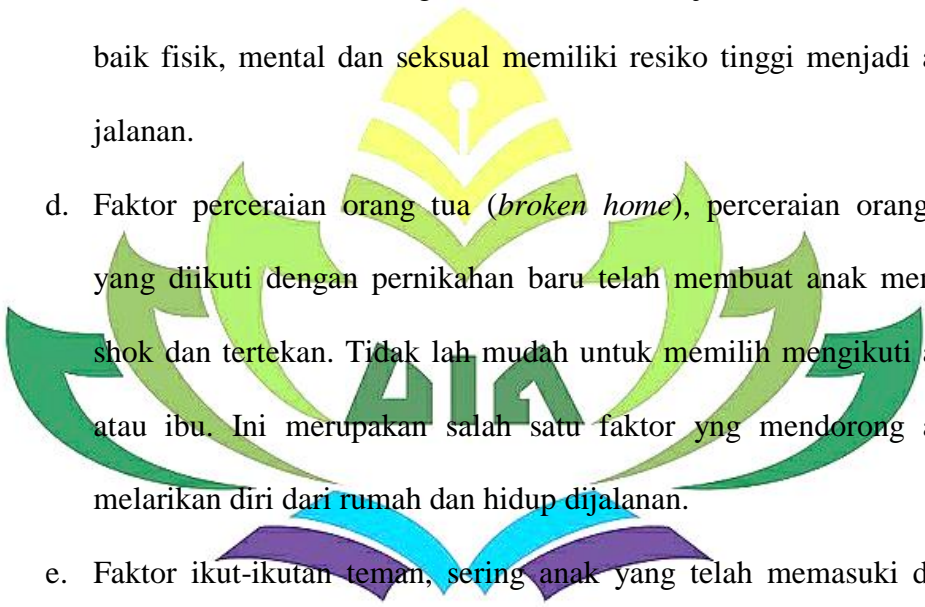
3) Disfungsi Keluarga

Penelitian yang khusus mengacu pada anak-anak yang dikategorikan sebagai of the street oleh UNICEF, menunjukkan bahwa motivasi mereka di jalanan bukanlah sekedar ekonomi. Kekerasan keluarga dan keretakan keluarga merupakan tema sentral dalam wawancara dengan mereka. Bagi anak-anak ini, kehidupan di jalanan yang keras lebih memberikan alternatif kekerasan jika dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh kekerasan. Dari penjelasan diatas, diketahui ada berbagai macam penyebab yang mengakibatkan anak berada di jalanan. Untuk itu, model penanganan terhadap anak selalu berbeda dan disesuaikan dengan kondisinya. Pada saat ini, alternatif penanganan anak jalanan mengarah ke pemberian pelayanan sosial kepada anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA). Pada hakikatnya, RPA sama dengan Rumah Singgah. Hanya saja, beberapa lembaga menggunakan nama yang berbeda untuk menyebutannya. Akan tetapi, pada saat sekarang ini, Rumah Singgah dikenal dengan nama RPA.³⁵

2. Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan

Faktor-faktor yang mendukung seseorang anak memasuki dunia jalanan yaitu sebagai berikut :

³⁵Melisa Amalia Amin, Hj. Hetty Krisnani, Maulana Irfan, *Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial*, No.1 Vol. 4, 2012, h. 183.

- 
- a. Faktor pembangunan, yang dimana mengakibatkan masyarakat perdesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sector formal dan menyebabkan mereka bekerja apapun untuk mempertahankan hidup.
 - b. Faktor kemiskinan, faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan munculnya anak-anak jalanan
 - c. Faktor kekerasan keluarga, anak selalu menjadi Korban kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi anak jalanan.
 - d. Faktor perceraian orang tua (*broken home*), perceraian orang tua yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan. Tidak lah mudah untuk memilih mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup dijalanan.
 - e. Faktor ikut-ikutan teman, sering anak yang telah memasuki dunia jalanan, menceritakan pengalaman nya pada teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak yang lain untuk mengikuti jejaknya.
 - f. Faktor kehilangan orang tua, banyak anak memasuki dunia jalanan karena kedua orang tua nya meninggal atau ditangkap kamtib dan dikembalikan ke daerah asalnya atau dilepas begitu saja di suatu

tempat. Akhirnya anak terpaksa hidup sendiri. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka melakukan kegiatan dijalanan.

- g. Faktor budaya ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki mengadu nasib kedaerah lain.³⁶

3. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindung oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁷ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Hak-hak yang melekat kepada manusia dimaksud diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya dan Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.³⁸

³⁶ Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan* (Semarang: Yayasan Setara, 2004), h. 7.

³⁷ *Ibid.*, h. 9

³⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 90.

Hak-hak asasi manusia secara Islam yaitu Konstitusi Madinah yaitu dokumen politik yang telah diletakkan nabi Muhammad pada 1400 tahun yang lalu, konstitusi telah menetapkan hak-hak asasi manusia, antara lain kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, jaminan keselamatan harta benda dan larangan orang berbuat kejahatan. Hakikat hak-hak asasi manusia yang diterapkan nabi Muhammad tersebut yaitu landasan membangun kesejahteraan sosial manusia.

Hak-hak asasi manusia secara Islam menurut Syeikh Syaikat Husain, 10 jenis hak asasi dalam Islam yaitu³⁹:

a. Hak Hidup

Hak asasi pertama kali dianugerahkan Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia lain. Allah melarang adanya pelanggaran terhadap hak hidup manusia, Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati hak hidup, walaupun terhadap bayi yang masih dalam rahim ibunya.

b. Hak Milik

Bersamaan dengan perlindungan terhadap hak-hak hidup manusia, agama Islam menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hak-hak ini mencakup hak untuk dapat menikmati dan menggunakan harta. Hak ini senantiasa dilindungi bagi setiap individu oleh negara Islam yang dipimpin Rasulullah.

³⁹Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 52.

c. Hak Perlindungan Kehormatan

Hak perlindungan kehormatan ketiga yang dianugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa perlindungan kehormatan. Demikian jelaslah sejauh mana kehormatan warga negara itu dipelihara dan dilindungi di bawah naungan negara Islam.

d. Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi

Islam mengakui adanya hak keleluasan hidup pribadi setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang.

e. Keamanan Kemerdekaan Pribadi

Agama Islam telah menegaskan bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat dipenjarakan, kecuali dia telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka. Dalam Islam, hak kebebasan pribadi ini berlaku bagi semua orang. Islam telah menghapuskan perbudakan dan penghambaan kepada manusia.

f. Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenangnya

Agama Islam mengakui hak individu, bahwa seseorang tidak dapat dipenjarakan atas tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain.

g. Hak untuk Memperotes Kezaliman

Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat Islam, untuk mengecam kezaliman pemerintah.

h. Kebebasan Ekspresi

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat seluruh umat manusia

i. Kebebasan Hati Nurani dan Kekayaan

Agama Islam memberikan kebebasan suara hati nurani dan keyakinan kepada seluruh umat manusia. Dalam hal ini, kaum muslimin diperbolehkan mengajak orang-orang nonmuslim untuk menuju jalan Islam.

j. Status Warga Nonmuslim dalam Negara Islam

Hak-hak yang diberikan negara Islam terhadap warga negaranya yang nonmuslim, tidaklah disamakan dengan yang diberikan oleh negara nasionalis terhadap golongan minoritas. Negara Islam adalah sebuah negara ideologis. Hak-hak khusus mereka itu telah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist, dan negara Islam tersebut harus memberikan hak-hak mereka.⁴⁰

4. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Hak-Hak Kesejahteraan Anak Dalam Islam

a. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ada empat

⁴⁰ *Ibid.*, h. 54

“Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu⁴¹:

1) Prinsip Non diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA (Konvensi Hak Anak) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini dapat kita baca dalam Pasal 2 KHA Ayat 1 : “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri dari orang tua walinya yang sah.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong,

⁴¹ Hadi Supeno, *Potret Anak Indonesia : Catatan Siluet dan Refleksi*, (Jakarta : komisi perlindungan anak Indonesia, 2010), h. 53

tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.⁴²

3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Pengasuhan yang tidak memberikan kenyamanan kepada anak, biaya pendidikan yang mahal, proses belajar mengajar yang menekan, dan layanan kesehatan yang tidak dapat diakses merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip ini.⁴³

4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*)

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang

⁴²*Ibid.*, 56.

⁴³*Ibid.*, 58

dalam posisi lemah, menerima, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁴⁴

Empat prinsip perlindungan anak di atas menjadi dasar penerapan hak-hak anak di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan adalah menjunjung tinggi serta melindungi hak dan kewajiban anak. Adapun hak anak yang terdapat dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, antara lain:

a) Hak Anak untuk beribadah dan mengembangkan kreatifitas

Dalam Pasal ini terdapat hak anak untuk beribadah menurut agamanya serta berfikir dan berekspresi. Pasal ini dimaksudkan memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektuaalitasny. Selain Pasal 6 terdapat Pasal 11 yang menyatakan anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya

b) Hak anak untuk diasuh oleh orang tua

Dalam ayat (1) Pasal 7 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan dalam ayat (2) Pasal 7 menyatakan dalam hal karena suatu sebab orang tuannya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau

⁴⁴ Ibid, hlm 59

diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

c) Hak memperoleh pelayanan kesehatan

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

d) Hak untuk mendapatkan pendidikan

Dalam Pasal ayat (1) menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat. Dalam Pasal 1 huruf a setiap anak berhak mendapatkan perlindungan pada satuan pendidikan dari kejahatan sosial dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya. Sedangkan dalam ayat (2) Pasal 9 menyatakan anak berhak mendapatkan pendidikan khusus.

e) Hak untuk berpendapat

Dalam Pasal 10 setiap anak berhak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Dalam konvensi hak-hak anak adanya hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas. Yang mencakup kebebasan meminta, menerima, dan memberi informasi dalam

segala jenis baik lisan, tertulis, atau cetak dalam bentuk seni atau melalui media lain.⁴⁵

f) Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan tidak baik

Dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal orang tua, wali atas pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum. Pasal lainnya yaitu Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjaatuhan hukuman yang tidak baik

g) Hak mendapat perlindungan hukum dan bantuan hukum

Pasal 17 ayat (1) menyatakan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku, dan membela diri memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup

⁴⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 109

untuk umum. Sedangkan ayat (2) menyatakan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahsiakan. Dalam Pasal 18 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Alasan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan pada bagian pembukaan Undang-Undang tersebut pada bab pertimbangan. Dimana dalam bagian pembukaan dijelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak ini dibuat sebagai wujud pengakuan pemerintah tentang posisi seorang anak yang merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam posisi ini, seorang anak memiliki hak dan martabat yang utuh sebagai seorang manusia. Sementara Undang-Undang perlindungan anak lahir karena pemerintah menyadari mengenai potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Pada pundak merekalah pada nantinya perjuangan serta proses pembangunan bangsa akan digantungkan. Anak memiliki peran yang cukup vital sebagai pelaksana pembangunan di masa mendatang. Jika sebuah bangsa bisa menciptakan anak-anak yang berkualitas, niscaya proses pembangunan bangsa bisa berjalan dengan baik pada nantinya. Dengan tanggung jawab yang dimilikinya ini, seorang anak harus diberi kesempatan yang luas agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini mencakup masalah fisik, mental,

ekonomi serta sosial dan memiliki akhlak yang baik. Alasan-alasan inilah yang mendasari mengenai pentingnya sebuah aturan hukum untuk bisa menciptakan kesejahteraan bagi seorang anak. Dengan demikian, seorang anak bisa mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun.⁴⁶

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan, karena perlindungan anak merupakan usaha membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa, sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan disebuah negara, demikian juga sebaliknya jika sedari muda mereka mendapat kasih sayang dan perlakuan yang benar, maka paling tidak cengkraman patologis dan psisko-sosial tidak begitu kuat mempengaruhi mereka untuk berbuat jahat. Perlindungan anak sudah semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistik yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik.⁴⁷

b. Hak-Hak Kesejahteraan Anak Dalam Islam

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua

⁴⁶Damanhuri Warganegara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan", Vol 5. No: 66 (Maret 2017), h. 8.

⁴⁷Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prospek Perlindungan Anak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 226

keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.⁴⁸

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya perlindungan anak dalam Islam berarti penampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.⁴⁹

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-syari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab atau keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).⁵⁰

⁴⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI 2007), h.15

⁴⁹ *Ibid.*, h. 13

⁵⁰ *Ibid.*, h. 15

a. Hak Pemeliharaan Agama (*Hifz Al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

Pemeliharaan agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan al-Qur'an, shalawat, dzikir dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir.

b. Hak Pemeliharaan Nasab atau Keturunan (*Hifz al-nasl*)

Ayat al-Ahzab ayat 5 ditulis ayat

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁵¹

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. *Pertama*, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. *Kedua*, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab anak dikenal sebagai anak yang tidak berpak atau keturunannya yang jelas, maka anak akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: sygma examedia arkanleema, 2009), h. 418

tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*Hifz Al-nafs*)

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski anak berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah anak lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.⁵²

Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui

⁵² *Ibid.*, 18

anaknya sendiri atau yang biasa yang disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan.

d. Hak Pemeliharaan Akal (*Hifz Al- 'aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan *hifz al- 'aql* (pemeliharaan atas akal).

Islam mengajarkan bahwa pendidikan anak bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11:



"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁵³

Berdasarkan pemaparan ayat di atas terlihatlah betapa al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa

⁵³ *Ibid.*, h. 543

memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.⁵⁴

Nash yang disebutkan di atas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan menfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat.

Pendidikan sejak dini bagi seseorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

⁵⁴ Fuaddudin, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 17

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan social. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam menanggulangi problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan bairul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seseorang muslim baik itu anak seseorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seseorang ayah.

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika orang tua tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal orang tua mampu maka orang tua akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan juga dalam Pasal 2 Ayat (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan dijelaskan pula dalam Pasal 4 Ayat (1) bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak

memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan, hal ini menegaskan bahwa anak harus mendapatkan kesejahteraan yang layak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, dan sosial mengingat anak penerus bangsa, terutama untuk kesejahteraan anak jalanan mengingat mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu perekonomiannya yang menyebabkan anak dibawah umur mencari uang dijalanan untuk kebutuhan mereka⁵⁵.

B. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Damanhuri Warganegara dengan judul “Perlindungan hukum terhadap anak jalanan” menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan dilakukan berbagai kebijakan oleh pemerintah yaitu dengan adanya Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan anak serta didirikannya lembaga perlindungan anak, adanya rumah singgah kemudian didirikannya sekolah khusus anak jalanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dahmanhuri Warganegara fokus padaperlindungan hukum terhadap anak jalanan serta adanya lembaga perlindungan anak dari pemerintah, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada kesejahtraan dan perlindungan hukum anak jalanan serta bagaimana program Dinas Sosial Kota Bandar

⁵⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Lampung dalam mengupayakan kesejahteraan anak jalanan dipandang dari prespektif hukum Islam.⁵⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Arifin dengan judul “Pembinaan anak jalanan oleh dinas sosial Kota Bandar Lampung” menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial dan masyarakat masih menuai berbagai permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasana, dan seharusnya pemerintah memelihara dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi untuk mengembangkan kesadaran hidup anak jalanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Arifin fokus pada pembinaan dan pemeliharaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada kesejahteraan dan perlindungan hukum anak jalanan serta bagaimana program Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mengupayakan kesejahteraan anak jalanan dipandang dari perspektif hukum Islam.⁵⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jonathan Tribuwono dengan judul “Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar (studi kasus pada Dinas Sosial)” menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan anak

⁵⁶Damanhuri Warganegara, *Perlindungan Hukum*, h. 7.

⁵⁷Syamsul Arifin, *Pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial, (skripsi:program studi pemikiran politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).*

jalan, pengemis, gelandangan, dan pengamen diatur dalam peraturan Daerah kota makassar Nomor 2 Tahun 2008 belum mampu diterapkan secara efektif, dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial di kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Jonathan Tribuwono fokus pada peraturan daerah kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam menanggulangi dan pembinaan anak jalanan, pengamen, gelandangan, dan pengemis di kota Makassar, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada kesejahteraan dan perlindungan hukum anak jalanan serta bagaimana program Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mengupayakan kesejahteraan anak jalanan dipandang dari perspektif hukum.⁵⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yosephine Na Rose Sinaga dengan judul “Potret kehidupan anak jalanan di Bandar Lampung (studi tentang faktor pendorong anak jalanan, interaksi sosial anak jalanan, pemaknaan perannya sebagai anak jalanan di Kota Bandar Lampung)” menyimpulkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi faktor dominan mereka untuk turun kejalan dengan alasan membantu perekonomian orang tua mereka serta proses interaksi yang terjadi pada anak jalanan dalam keluarga berupa kerjasama untuk memenuhi perekonomian keluarga.

⁵⁸Jonathan Tribuwono, Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (studi kasus pada Dinas Sosial), (*skripsi: program studi administrasi negara Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Yosephine Na Rose Sinaga fokus padapotret kehidupan anak jalanan serta faktor yang mendorong anak untuk turun ke jalanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada kesejahteraan dan perlindungan hukum anak jalanan serta bagaimana program Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mengupayakan kesejahteraan anak jalanan dipandang dari prespektif hukum Islam.⁵⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi Shadiqin yang berjudul “Peran keluarga dalam pembinaan anak jalanan di jalanan Sultan Alauddin Makassar” menyimpulkan bahwa peran keluarga dalam pembinaan dan pendidikan anak jalanan di kawasan Jalan Sultan Alauddin tidak berperan dengan baik sebagaimana mestinya, keluarga anak jalanan cenderung melakukan pembiaran terhadap pembinaan anak jalanan serta masih sangat minim peran orang tua untuk memperhatikan pendidikan anaknya baik di rumah maupun di lingkungan tempat anak bermain.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi Shadiqin fokus pada peran keluarga dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak jalanan di kawasan Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada

⁵⁹Yosephine Na Rose Sinaga, Potret kehidupan anak jalanan di Bandar Lampung (studi tentang faktor pendorong anak jalanan, interaksi sosial anak jalanan, pemaknaan perannya sebagai anak jalanan di Kota Bandar Lampung),(skripsi: program studi Sosiologi Universitas Lampung, 2017).

kesejahteraan dan perlindungan hukum anak jalanan serta bagaimana program Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mengupayakan kesejahteraan anak jalanan dipandang dari perspektif hukum.⁶⁰



⁶⁰Nurhadi Shadiqin, Peran keluarga dalam pembinaan anak jalanan di jalanan sultan Alauddin Makassar, (*skripsi: program studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Pada Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Arikunto Suharsimi, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Graha Ilmu, 2014
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Dr. Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: PenaMedia Group, 2016.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grfika, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : CV Peneribit di Ponegoro, 2010.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabet, 2008
- Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Fuaddudin, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Hasin Said Agil, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadan, 2005.
- Hadi Supeno, *potret anak Indonesia: catatan siluet dan refleksi*, Jakarta: komisi perlindungan anak Indonesia, 2010.
- Ibnu Anshori, *perlindungan anak menurut prespektif islam*, Jakarta: KPAI, 2007.
- Muhtaj Majda El, *Hak Asasi Mnesia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Narbuko Cholid, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010

Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*, Jakarta: Amzah, 2016.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Sukrame: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Semarang: Yayasan Setara, 2004.

Tika Pabundu Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006.

Usman Husaini, Akbar Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial edisi kedua*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

B. Jurnal dan Skripsi

Damanhuri Warganegara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*, *jurnal unila*, 2017.

Jonathan Tribuwono, Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar (studi kasus pada Dinas Sosial), *skripsi: program studi dministrasi negara Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.

Melisa amalia amin, Hj. Hetty Krisnani, Maulana Irfan, pelayanan sosial bagi anak jalanan ditinjau dari perspektif dari pekerjaan sosial, *Jurnal kesejahteraan sosial*, 2012.

Nurhadi Shadiqin, Peran keluarga dalam pembinaan anak jalanan di jalanan sultan Alauddin Makassar, (*skripsi: program studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, 2018.

Syamsul Arifin, Pembinaan anak jalnan oleh Dinas Sosial, *skripsi: program studi pemikiran politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.

Yosefhine Na Rose Sinaga, Potret kehidupan anak jalanan di Bandar Lampung (studi tentang faktor pendorong anak jalanan, interaksi sosial anak jalanan, pemaknaan perannyaa sebagai anak jalanan di Kota Bandar Lampung), *skripsi: program studi Sosiologi Universitas Lampung*, 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Dasar 1945

D. Wawancara

Wawancara, Eva, Kepala Bidang, Pengurus Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 23 september 2019

Wawancara, Ahmad sholihin, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Heriansyah dan Panca, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Bayu Putra, Anak Jalanan, september 2019

Wawancara, Putra, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Danang, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Diska, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Anggun, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Anggi, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Shinta, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Tio, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Cintia, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Wahyu, Anak Jalanan, 20 september 2019

Wawancara, Astrid, Anak Jalanan, 20 september 2019.

E. Sumber on-line

Melia Handayani, “ Dainas Sosial Kota Bandar Lampung” (On-line), tersedia di https://id.m.wikipedia.org/wiki/dinas_sosial_kota_bandar_lampung (14 september 2019).

